

## **ABSTRAK**

### **PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN LABUHAN RATU LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**  
**Yemima Hotmaria Purba**

Salah satu pengeluaran yang wajib dibayar dalam pengelolaan dana desa adalah pembayaran pajak. Mengingat pembangunan fisik atau konstruksi desa lebih banyak menggunakan sistem swakelola menyebabkan kesulitan dalam menentukan jenis pajak, obyek pajak, dan wajib pajak dalam bertransaksi. Kesulitan tersebut berdampak bahwa terdapat sejumlah desa yang tidak taat memenuhi kewajiban perpajakan dalam pengelolaan dana desa. Hal itu tidak selaras dengan upaya mewujudkan prinsip Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan dan pembayaran pajak pengelolaan dana desa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang dianalisis dengan interpretasi hukum. Hasil penelitian ditemukan: pertama pengelolaan dana desa yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa merupakan objek pajak, baik pajak pertambahan nilai (PPN) ataupun pajak penghasilan (PPh); kedua pembayaran pajak dalam pengelolaan dana desa yang terdiri dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi yang terjadi, menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut ke kas negara, melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar, dan memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur belum berjalan secara optimal. Saran dalam penelitian perlu dilaksanakan penguatan pemahaman bendahara desa tentang pentingnya perpajakan bagi pemerintah Indonesia, dengan cara Pembinaan secara berkala melalui pelatihan/workshop/seminar serta perlu peningkatan pengawasan pembayaran pajak pengelolaan dana desa serta monitoring dari atasan, Inspektorat, dan Kantor Pelayanan Pajak.

**Kata Kunci : Pajak, Dana Desa, *Good Governance*.**

## **ABSTRACT**

### **TAX PAYMENT ON VILLAGE FUND MANAGEMENT TO REALIZE GOOD GOVERNANCE IN LABUHAN RATU SUB-DISTRICT EAST LAMPUNG**

**By**  
**Yemima Hotmaria Purba**

*One of the expenses that must be paid in managing village funds is the payment of taxes. Considering that the physical development or construction of villages mostly uses the self-management system, it causes difficulties in determining the type of tax, tax object and taxpayer in transactions. This difficulty resulted in a number of villages not complying with tax obligations in managing village funds. This is not in line with efforts to realize the principles of Good Governance. This study aims to analyze the imposition and payment of taxes on village fund management in Labuhan Ratu District, East Lampung. The research approach used is a statute approach and a case approach, by utilizing primary and secondary data analyzed by legal interpretation. The results of the study found: first, the management of village funds used for spending on goods and services is a tax object, both value added tax (PPN) and income tax (PPh); secondly paying taxes in the management of village funds consisting of registering as a taxpayer, deducting and/or collecting transactions that occur, depositing tax that has been withheld and/or collected to the state treasury, reporting tax deductions and/or collection to the KPP where registered treasurer, and providing evidence of deductions/collections to parties who are deducted or collected in Labuhan Ratu District, East Lampung Regency has not run optimally. Suggestions in the research need to be carried out to strengthen the village treasurer's understanding of the importance of taxation for the Indonesian government, by means of regular coaching through training/workshops/seminars and the need to increase supervision of tax payments on village fund management and monitoring from superiors, the Inspectorate, and the Tax Service Office.*

**Keywords : Tax, Village Funds, Good Governance**